



PROBLEMA TATA KELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Dr. Rusdiono, M.Si

Editor: Dr. Ira Patriani, M.Si

PROBLEMA TATA KELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

PENULIS

Dr. Rusdiono, M.Si

EDITOR

Dr. Ira Patriani, M.Si



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROBLEMA TATA KELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Dr. Rusdiono, M.Si

EDITOR:

Dr. Ira Patriani, M.Si

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7051-28-8

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2024

UKURAN:

iv + 139 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul "Problema Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perbatasan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan akan literatur yang membahas tata kelola dalam konteks pelaksanaan program pembangunan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan sosial. Pos lintas batas negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat adalah salah satu contoh nyata dari kawasan yang memiliki potensi besar namun juga menghadapi berbagai permasalahan kompleks. Buku ini menyajikan berbagai analisis dari perspektif *good governance*, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di wilayah kawasan perbatasan.

Hasil penelitian yang disajikan dalam buku referensi ini relevan dengan kebijakan publik karena memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi dari perubahan kebijakan lintas batas terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan dan implikasi pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik yang menyertainya dalam mendukung aktivitas PLBN Entikong. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis mendalam, buku ini mengeksplorasi persoalan tata kelola yang menimbulkan berbagai persoalan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan dan menawarkan rekomendasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan yang dihadapi tersebut. Pentingnya hasil dari penelitian ini terletak pada kemampuannya

untuk menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan, serta untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan yang lebih efektif.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu perbatasan dan kebijakan publik yang terkait kawasan perbatasan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan baik pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ira Patriani, M.Si, Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si dan Ghina Aprilia S.A.P yang terlibat langsung dalam penyelesaian buku referensi ini dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pembacanya.

Pontianak, November 2024

Dr. Rusdiono, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PROBLEMA PENGELOLAAN KAWASAN	
PERBATASAN	1
A. Problema Tata Kelola Kawasan Perbatasan	1
B. Problema Proses dan Problema Pemanfaatan	
Program Pembangunan Kawasan Perbatasan	8
C. Problema Inkonsistensi Perencanaan Pembangunan	
Infrastruktur Jalan Nasional Perbatasan	15
BAB II PARADIGMA, UNSUR DAN PRINSIP GOOD	
GOVERNANCE.....	24
A. Paradigma Good Governance	24
B. Perbandingan Government dan Governance	
Berdasarkan Unsur dan Aspek.....	28
C. Prinsip-Prinsip Good Governance	33
D. Dimensi Perspektif Good Governance	42
BAB III KETIADAAN NILAI DALAM PROSES GANTI	
RUGI LAHAN TERDAMPAK PROGRAM.....	45
A. Ketiadaan Nilai Transparansi dalam Penetapan	
Ganti Rugi Lahan.....	45
B. Ketiadaan Nilai Moral-Legal dalam Proses Ganti	
Rugi Lahan.....	51
BAB IV DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN TERHADAP	
MASYARAKAT PERBATASAN	59
A. Dampak Kebijakan Pembebasan Lahan terhadap	
Kemiskinan Warga Terdampak	59
B. Dampak Kebijakan Perubahan Status PLBN	
terhadap Hijrah Pedagang Ke Serikin Malaysia	63

BAB V	KETIADAAN DISKRESI DAN KOLABORASI PENGHAMBAT OPERASIONALISASI PROGRAM	81
A.	Ketiadaan Diskresi Penghambat Operasionalisasi Pasar Modern Entikong	81
B.	Ketiadaan Kolaborasi antar Domain Penghambat Operasionalisasi Dry Port Entikong	97
C.	Ketiadaan Diskresi Kebijakan Penghambat Kesejahteraan Masyarakat.....	115
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	129
A.	Kesimpulan.....	129
B.	Rekomendasi	132
DAFTAR PUSTAKA		135
PROFIL PENULIS		139